

# KPU: Surat Suara Hemat Rp 291 Miliar

REPUBLIKA - 21 Jan'19 - (1)

WIHIDAN/REPUBLIKA

● DIAN ERIKA NUGRAHENY

## Proses pencetakan surat suara dijaga ketat.

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim produksi surat suara Pemilu 2019 berhasil menghemat anggaran lebih dari Rp 291 miliar. KPU secara resmi memulai produksi surat suara pemilu melalui enam konsorsium perusahaan pada Ahad (20/1).

Komisiner KPU Ilham Saputra menuturkannya, dari pengadaan surat suara, KPU setidaknya berhasil melakukan penghematan sebesar Rp 291.378.192.100,00 atau 32,57 persen dari total pagu anggaran Rp 894.720.293.000,00. "Atau telah hemat Rp 269.349.301.525, atau 30,86 persen dari harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 872.691.402.425," ujar Ilham Saputra dalam konferensi pers di gedung Percetakan Gramedia, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Ahad (20/1).

Menurut Ilham, KPU telah resmi memulai proses produksi surat suara untuk kebutuhan Pemilu 2019. Total surat suara yang diproduksi sebanyak 939.879.651 lembar dan diproduksi serentak oleh enam konsorsium perusahaan. "Keenam konsorsium sendiri tersebar di 35 lokasi, di 3 provinsi, de-

ngan nilai kontrak Rp 603.342.100.900," lanjut Ilham.

Ia menambahkan, proses produksi surat suara sesuai jadwal tender berlangsung pada 19 Januari hingga 19 Maret 2019. Kemudian, distribusi dan serah terima surat suara akan berlangsung pada 1 Maret hingga 29 Maret 2019.

Ilham menegaskan, tidak ada surat suara yang dicetak di Cina. Seluruh surat suara untuk kebutuhan Pemilu 2019 dicetak di Indonesia. "Kami tegaskan, tidak ada surat suara yang dicetak di Cina. Semua dicetak di Indonesia," ujar Ilham.

Komisiner KPU lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi, mengklaim surat suara Pemilu 2019 tidak bisa dipalsukan. KPU menggunakan pengamanan internal dan eksternal untuk lima jenis surat suara. Pertama, dari sisi material kertasnya diberi mikroteks. "Menggunakan mikroteks. Mikroteks itu banyak jenisnya, misalnya yang dipakai dalam pencetakan uang itu hanya salah satu saja," ujar Pramono.

Kedua, pengamanan dari sisi prosedurnya. Prosedur ini meliputi tenaga ahli untuk mengontrol kualitas surat suara yang dicetak, penyortiran oleh KPU, pengawasan Bawaslu, dan pengamanan secara ketat oleh kepolisian.

Lebih lanjut, Pramono memaparkan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan produksi dan distribusi surat suara sekitar 60 hari. Nantinya,

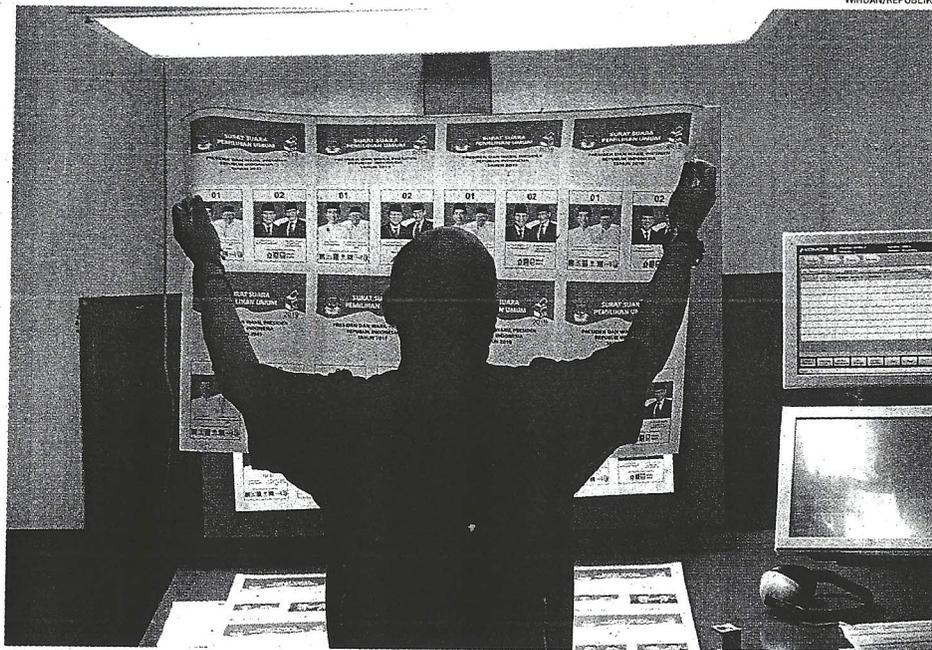
distribusi surat suara ini diprioritaskan ke daerah dengan kondisi geografis yang sulit.

"Diharapkan pada pertengahan Maret 2019 seluruh surat suara telah dikirim ke KPU kabupaten/kota. Dengan demikian, masih cukup waktu untuk melakukan penyortiran, penghitungan, pengepakan, dan pengiriman secara berjenjang dari KPU kabupaten/kota ke kecamatan, desa/kelurahan, hingga TPS," ungkapnya.

Dalam keadaan tertentu, proses produksi masih bisa dipercepat, yakni dengan menambah jam kerja. Saat ini, setiap pabrik melakukan produksi surat suara selama 16 jam per hari. Semua pabrik sudah berkomitmen, jika terjadi hal-hal darurat, durasi produksi mereka masih dapat ditingkatkan menjadi 20 jam per hari.

### Pengamanan

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan, pihaknya mengawasi secara ketat proses pencetakan surat suara



**CETAK PERDANA** Petugas memeriksa surat suara pemilihan presiden 2019 di Jakarta, Ahad (20/1). Sebanyak 187.975.930 lembar surat suara dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilpres 2019.

Pemilu 2019. Bawaslu memastikan agar jumlah surat suara yang keluar dari pabrik tidak melebihi jumlah total produksi untuk 34 provinsi.

"Bawaslu dalam hal ini mengawasi proses pencetakan, termasuk penyimpanannya. Bersama KPU kami akan awasi apakah jumlah yang dicetak sesuai, kemudian kualitasnya sesuai kontrak dan sebagainya sebagaimana yang disetujui dalam kontraknya," ujar Fritz.

Pada kesempatan terpisah, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Selam, mengatakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh KPU dan Bawaslu selama proses produksi surat suara. Pertama, KPU dan Bawaslu bekerja sesuai aturan dan prosedur untuk mencegah pelanggaran administrasi.

"Kedua, kami harap tidak ada *hacks* lagi soal surat suara. Kalau ada, semoga segera bisa dibantah," ujar Alfitra. Terakhir, dirinya meminta semua pihak mau melaporkannya jika ada pelanggaran saat proses pencetakan su-

rat suara.

Perihal pengamanan, Staf Operasi (SOPS) Mabes Polri AKBP Gusti Maychandra mengatakan, ada dua hingga lima personel polisi yang ditugaskan untuk mengamankan satu lokasi percetakan. "Bersama-sama dengan tim *quality control* dan tim kontrol dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, selama 1 x 24 jam kami amankan lokasi percetakan," ujar Gusti.

Ia menambahkan, tidak ada lokasi percetakan yang berada di daerah dengan kerawanan tinggi. Sebab, secara internal, baik Polri, KPU, maupun Bawaslu telah mengamankan proses pencetakan surat suara untuk pemilu ini.

Saat disinggung tentang pengamanan distribusi, ia menuturkannya, petugas tetap melakukan pengamanan hingga ke lokasi penyimpanan. "Semua tetap sama, pasti akan kami amankan. Tentunya kita akan berkoordinasi ke KPU. Apakah diminta atau tidak diminta, tentunya kita mengawal sampai ke penyimpanan," ujarnya.

■ ed: agus raharjo

## Daftar Produsen Surat Suara Pemilu 2019:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. PT Aksara Grafika Pratama (DKI Jakarta)<br>68.176.374 lembar surat suara (7,25 persen).    | suara (31,07 persen). |
| 2. PT Batai Pustaka (DKI Jakarta)<br>139.894.529 lembar surat suara (14,88 persen).           |                       |
| 3. PT Tempina Media Grafika (Jawa Timur)<br>255.019.544 lembar surat suara (27,13 persen).    |                       |
| 4. PT Gramedia (DKI Jakarta)<br>292.019.984 lembar surat                                      |                       |
| 5. PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan)<br>77.054.270 lembar surat suara (8,20 persen). |                       |
| 6. PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur)<br>107.714.950 lembar surat suara (11,46 persen).    |                       |

**Total: 939.879.651 lembar surat suara (100 persen).**

Sumber: KPU dan LKPP